

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Penelitian**

Pemekaran daerah merupakan pemekaran daerah provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari satu daerah yang berdekatan berdasarkan yang di jelaskan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemekaran Daerah Pemerintahan Daerah, wilayah provinsi memasuki wilayah baru. Ayat 2 Pasal 32 menentukan bahwa pembagian wilayah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten dan kota. Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa pembentukan kawasan persiapan harus memenuhi persyaratan pokok dan administratif.<sup>1</sup>

Perlunya pemekaran daerah pada hakekatnya merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berdaya guna untuk mencapai percepatan pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Demikian juga mengembangkan otonomi dalam transisi ini merupakan dari dalam inisiatif pembangunan (melihat ke dalam), pemberdayaan masyarakat (pemerintahan sendiri) harus menjadi proses pemberdayaan dalam rangka menyelenggarakan pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan kesempatan yang lebih luas.

Pemberdayaan daerah dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, asli dan akuntabel merupakan dua langkah strategis. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal yang dihadapi bangsa Indonesia seperti ancaman disintegrasi negara, kemiskinan, ketimpangan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <http://www.bappenas.go.id/node/123/19/uu-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/> [Accessed: 25

pembangunan,

rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan permasalahan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk melangkah menuju era globalisasi ekonomi dengan memperkuat pondasi ekonomi daerah.<sup>2</sup>

Inisiatif baru untuk meningkatkan manajemen pemerintahan adalah untuk menjawab keinginan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah, maka penataan pemerintahan di berbagai daerah diatur melalui pemekaran daerah. pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, secara teoritis, perluasan kekuasaan pemerintah di daerah diharapkan dapat membangun akuntabilitas lokal dan daya tanggap pemerintah daerah yakni kemampuan pemerintah daerah untuk merespon hak-hak masyarakatnya dan akses kepada pemerintah dengan mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat. masyarakat dan mendorong partisipasi. Karena rentang kendali yang tidak jauh lagi, pengelolaan dan pembangunan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Pemekaran wilayah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Ini dicapai melalui pengurangan jangkauan kendali pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan manajemen pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan pengertian dan alasan di balik pemekaran. Selama ini, pertumbuhan pesat provinsi, kabupaten, dan jalan selalu dikaitkan dengan euforia pemekaran daerah selalu dikaitkan dengan pemekaran provinsi, kabupaten/kota, dan

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, Krisis Moneter Indonesia, Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Jakarta: 2018

<sup>3</sup> Fauzi tentang pemekaran daerah 2019, hlm.7

jalan yang mengalami pertumbuhan pesat.<sup>4</sup> Namun, disamping pemekaran provinsi, kabupaten, kota terdapat banyak kelurahan dan desa telah melakukan pemekaran desa. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah desa yang dibentuk oleh transmigrasi telah berkembang. Sejak desember 2019, ada 1.562 desa, naik tajam hingga 1.605 desa pada juni 2021. Dengan demikian, 1.757 desa baru ditambahkan dalam waktu lima tahun.<sup>5</sup>

Pemerintah membentuk desa dalam PP. Nomor 43 Tahun 2014, berupa pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih. Pada saat pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan penataan desa melalui pemekaran desa, perlu mensosialisasikan rancangan pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa terkait. Rencana pemekaran desa dibahas oleh rapat Desa dalam musyawarah desa untuk mencapai mufakat. Hasil musyawarah desa dipertimbangkan, diserahkan kepada bupati/walikota untuk perencanaan desa dan disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota.<sup>6</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keputusan tentang pemekaran desa dan kecamatan harus dibuat melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun, sejak UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, keputusan tentang pemekaran hanya dapat dicapai melalui Peraturan Daerah (Perda). Disebabkan syarat yang lebih mudah untuk melakukan pemekaran desa, peraturan ini meningkatkan jumlah permohonan pemekaran desa. Jumlah desa baru juga meningkat karena semangat otonomi, keluarnya PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengoptimalkan operasi

---

<sup>4</sup> Effendy tentang tujuan pemekaran daerah, 2018 dikutip Suryanto, 2019, hlm. 2

<sup>5</sup> Data BPS provinsi jambi Tahun 2019-2021 tentang kenaikan penambahan desa baru

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pemerintah desa.<sup>7</sup>

Pemekaran desa adalah proses pembentukan desa baru yang merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran desa diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat di tingkat lokal.

Menurut Edi Suharto, pemekaran desa adalah kebijakan pembentukan desa baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat pedesaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mempercepat pembangunan pedesaan.<sup>8</sup>

Pemekaran desa adalah proses pembentukan desa baru yang merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran desa diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat di tingkat lokal. Desa Mekar Sari Ness merupakan salah satu desa yang mengalami pemekaran di Kabupaten Batanghari.

Di Provinsi Jambi tepatnya di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari terdapat salah satu desa yaitu Desa Mekar Sari Ness yang merupakan pecahan dari pemekaran desa induk dari Desa Batin pada tahun 2015. Pada saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 1160 terdiri dari 3 dusun dan 10 Rt dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) ialah 362.

Pekerjaan sebagian masyarakat di Desa Mekar Sari Ness ialah petani

---

<sup>7</sup> Farida Nurani, 'Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa', *Administrasi Publik*, 2 (2013) <[https://www.researchgate.net/profile/Alfian-Faisal/publication/333918596\\_Public\\_Welfare\\_after\\_Village\\_Proliferation/links/5d0cc4c6299bf1547c71c30a/Public-Welfare-after-Village-Proliferation.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Alfian-Faisal/publication/333918596_Public_Welfare_after_Village_Proliferation/links/5d0cc4c6299bf1547c71c30a/Public-Welfare-after-Village-Proliferation.pdf)>.

<sup>8</sup> Edi suharto, *Pemekaran Desa Membangun Desa*, 2019 [https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/buku-5 desa-mandiri-desa-membangun-oleh-kemendes-pdt](https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/buku-5%20desa-mandiri-desa-membangun-oleh-kemendes-pdt)

karet, perkebunan sawit dan buruh harian lepas dengan pendapatan yang jauh di bawah rata-rata UMR (Upah Minimum Regional). Kapasitas perekonomian desa Mekar Sari Ness sebagian besar ialah lahan pertanian yaitu karet dan sawit.

Pemekaran Desa Mekar Sari Ness di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya lokal yang lebih efektif dan efisien. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa.

Desa Mekar Sari Ness adalah salah satu desa di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang merupakan hasil pemekaran Desa Batin pada tahun 2015. Desa Mekar Sari Ness mewarisi sekitar 1160 jiwa penduduk atau 43,3% dari daerah induk yaitu Desa Batin dengan jumlah penduduk 2818 jiwa.

Pemekaran Desa di Desa Mekar Sari Ness merupakan inisiasi oleh masyarakat kemudian pengurus BPD dan perangkat Desa Batin (ialah desa induk sebelum pemekaran) menyepakati adanya prosedur pemekaran desa. Semua pemangku kepentingan sepakat bahwa kualitas pelayanan publik di Dusun Merbau A dan Merbau B paling jauh dari pusat pemerintahan yaitu jalan (9 km) dan jarak ke pusat pelayanan desa (14 km). Masyarakat tidak puas dengan pelayanan publik karena jaraknya yang jauh dari pusat pemerintahan.

Inti dari pemekaran Desa Mekar Sari Ness merupakan untuk meningkatkan dan mendekatkan jarak antara pelayanan pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini, desa induk yaitu Desa Batin luasnya 1.353 hektar, terhitung lebih dari 30% dari luas seluruh Kecamatan Bajubang, dan berpenduduk besar hampir 2818 jiwa. jarak antar Medannya sulit dan jauh, serta pemberian layanan tidak optimal. Evaluasi

pelaksanaan zonasi umumnya dilakukan 12 tahun setelah kawasan yang bersangkutan resmi menjadi kawasan baru. Desa Mekar Sari Ness telah berstatus desa baru selama 12 tahun sejak tahun 2012 karena pemekaran, dan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk evaluasi, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis desa kesejahteraan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di masyarakat luas.<sup>9</sup>

Berdasarkan usia desa yang baru 9 tahun sejak pemekaran desa Mekar Sari Ness pada tahun 2015, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penilaian. Usia desa dusun baru dapat diperkirakan setidaknya 5 tahun setelah dusun tersebut. Dikarenakan dampak pemekaran berdasarkan pelaksanaan pemekaran wilayah di Indonesia selama 20 tahun terakhir belum mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta gagal memberikan dampak positif bagi daerah asal, sehingga tidak semua keputusan pemerintah diambil. diterima. dilakukan.

Memperluas wilayah di Indonesia adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu peneliti ingin mengecek, apakah hasil pemekaran yang dilakukan di desa Mekar Sari Ness memberikan hasil yang berbeda atau tidak melakukan perubahan desa di desa tersebut, dengan judul yaitu “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi kasus pada Desa Mekar Sari Ness Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

---

<sup>9</sup> Nuraeni, ‘Dampak Pemekaran Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Onemanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1 (2019), 33–43 <<https://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoRespublica/article/view/9697/7155>>.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Di 12 Kabupaten/Kota tahun 2019-2023**

<b>Kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan jiwa)</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kerinci</b>	<b>17.00</b>	<b>17.48</b>	<b>18.45</b>	<b>18.20</b>	<b>18.21</b>
<b>Merangin</b>	<b>32.88</b>	<b>33.92</b>	<b>35.44</b>	<b>34.14</b>	<b>35.19</b>
<b>Sarolangun</b>	<b>25.39</b>	<b>25.79</b>	<b>27.06</b>	<b>26.23</b>	<b>26.77</b>
<b>Batanghari</b>	<b>26.53</b>	<b>26.54</b>	<b>27.24</b>	<b>26.24</b>	<b>25.88</b>
<b>Muaro Jambi</b>	<b>16.86</b>	<b>17.30</b>	<b>20.49</b>	<b>20.64</b>	<b>20.83</b>
<b>Tanjung Jabung Timur</b>	<b>25.35</b>	<b>24.23</b>	<b>24.42</b>	<b>23.42</b>	<b>23.33</b>
<b>Tanjung Jabung Barat</b>	<b>35.12</b>	<b>34.79</b>	<b>36.10</b>	<b>33.95</b>	<b>33.61</b>
<b>Tebo</b>	<b>22.83</b>	<b>22.47</b>	<b>23.77</b>	<b>22.81</b>	<b>23.47</b>
<b>Bungo</b>	<b>20.87</b>	<b>22.07</b>	<b>23.64</b>	<b>20.69</b>	<b>20.65</b>
<b>Kota Jambi</b>	<b>48.95</b>	<b>50.44</b>	<b>54.23</b>	<b>50.40</b>	<b>50.09</b>
<b>Kota Sungai Penuh</b>	<b>2.55</b>	<b>2.78</b>	<b>3.03</b>	<b>50.40</b>	<b>50.09</b>
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>274.32</b>	<b>277.80</b>	<b>293.86</b>	<b>279.37</b>	<b>280.68</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin 2019-2023*

Data tersebut menunjukkan jumlah penduduk miskin (dinyatakan dalam ribuan jiwa) di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2019-2023. Pada data di atas menunjukkan Pada tahun 2019, Kabupaten/Kota Kerinci memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 17.00 ribu jiwa, yang kemudian mengalami kenaikan menjadi 17.48 ribu jiwa pada tahun 2020, dan meningkat lagi menjadi 18.45 ribu jiwa pada tahun 2021. Sementara itu, di Kabupaten/Kota

Merangin, jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebanyak 32.88 ribu jiwa, meningkat menjadi 33.92 ribu jiwa pada tahun 2020, dan terus naik menjadi 35.44 ribu jiwa pada tahun 2021. Hal serupa terjadi di Kabupaten/Kota lainnya seperti Sarolangun, Batanghari, dan Muaro Jambi, yang juga mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun dalam periode yang sama. Kota Jambi menunjukkan jumlah penduduk miskin yang signifikan, dengan 48.95 ribu jiwa pada tahun 2019, yang meningkat menjadi 50.44 ribu jiwa pada tahun 2020, dan naik lagi menjadi 54.23 ribu jiwa pada tahun 2021. Di sisi lain, Kota Sungai Penuh memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif kecil dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, namun masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Provinsi Jambi secara keseluruhan juga menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 hingga 2023.

Masyarakat Desa Mekar Sari Ness menghadapi tingkat kesejahteraan yang rendah yang terkait erat dengan masalah kemiskinan pasca melakukan pemekaran desa. Dan dapat dilihat dari data BPS 9 tahun setelah dilakukan pemekaran Desa bahwa Desa Mekar Sari Ness mengalami peningkatan penerima program bantuan dari pemerintah yang semakin meningkat menandakan bahwa masyarakat Mekar Sari Ness masih belum ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukannya pemekaran desa. Kemiskinan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Mekar Sari Ness mengalami tantangan yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan, yang berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan yang rendah di antara penduduknya.<sup>10</sup>

#### 1. Pendapatan dan Penghidupan yang Terbatas: Tingkat kemiskinan yang

---

<sup>10</sup> Sumber data pusat statistik jumlah pendapatan perkapita penduduk miskin dari tahun 2015-2023 di desa Mekar Sari Ness

tinggi sering kali berarti bahwa penduduk di Desa Mekar Sari Ness memiliki pendapatan yang sangat rendah. Pendapatan yang terbatas menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan transportasi. Kurangnya sumber daya ekonomi ini secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Akses Terbatas ke Layanan Dasar: Masyarakat miskin di Desa Mekar Sari Ness mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti perawatan kesehatan, infrastruktur yang tidak memadai atau jarak yang jauh ke pusat layanan sering kali menjadi hambatan dalam memperoleh akses yang memadai. Kurangnya akses ini dapat menyebabkan kondisi kehidupan yang tidak sehat, dan kesulitan dalam mengatasi masalah kesehatan.
3. Ketidakstabilan Pekerjaan: Tingkat kemiskinan yang tinggi di Desa Mekar Sari Ness sering kali berhubungan dengan ketidakstabilan pekerjaan. Banyak penduduk mungkin hanya memiliki pekerjaan sementara, pekerjaan informal, atau pekerjaan dengan upah rendah. Kurangnya stabilitas dalam pekerjaan menyebabkan ketidakpastian penghasilan dan menghambat kemampuan individu untuk merencanakan masa depan mereka secara ekonomi.
4. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Masalah kemiskinan di Desa Mekar Sari Ness juga dapat terkait dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat, dan keterbatasan kesempatan ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang tidak merata

secara sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kesempatan bagi individu untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Dalam rangka mengatasi masalah ini, pemerintah setempat perlu melakukan langkah-langkah yang holistik dan terintegrasi. Ini mungkin melibatkan upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, memperbaiki infrastruktur, mempromosikan kesetaraan ekonomi, serta melindungi dan mengelola lingkungan dengan baik..<sup>11</sup>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah pendapatan perkapita di Desa Mekar Sari Ness Tahun 2010-2014**  
**Sebelum di lakukan pemekaran Desa**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kartu Keluarga</b>	<b>Jumlah penduduk</b>	<b>Pendapapatan per Kapita ( perbulan )</b>
<b>2010</b>	<b>145</b>	<b>743</b>	<b>669.000</b>
<b>2011</b>	<b>167</b>	<b>788</b>	<b>730.000</b>
<b>2012</b>	<b>224</b>	<b>956</b>	<b>700.000</b>
<b>2013</b>	<b>237</b>	<b>966</b>	<b>750.000</b>
<b>2014</b>	<b>249</b>	<b>1002</b>	<b>750.000</b>

*Sumber: BPS pedapatan perkapitaDesa Mekar Sari Ness tahun 2010-2014*

Dari Tabel menyajikan data jumlah pendapatan per kapita di Desa Mekar Sari Ness pada periode tahun 2010 hingga 2014, sebelum dilakukan pemekaran desa. Dari tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah kartu keluarga dan penduduk di desa tersebut selama lima tahun berturut-turut.

Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2010-2014, meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk dan kartu keluarga, pendapatan per kapita di Desa Mekar Sari Ness tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan sempat mengalami penurunan pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan adanya

---

<sup>11</sup> Mini riset yang di lakukan peneliti kepada kasipem Bapak Ilham Selasa

tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk sebelum pemekaran desa dilakukan.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah pendapatan perkapita di Desa Mekar Sari Ness**  
**setelah di lakukan pemekaran Desa Tahun 2015-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kartu Keluarga</b>	<b>Jumlah penduduk</b>	<b>Pendapapatan per Kapita ( perbulan )</b>
<b>2015</b>	<b>286</b>	<b>1081</b>	<b>750.000</b>
<b>2016</b>	<b>292</b>	<b>1090</b>	<b>800.000</b>
<b>2017</b>	<b>300</b>	<b>1100</b>	<b>1.000.000</b>
<b>2018</b>	<b>304</b>	<b>1122</b>	<b>1.000.000</b>
<b>2019</b>	<b>318</b>	<b>1133</b>	<b>1.130.000</b>
<b>2020</b>	<b>326</b>	<b>1142</b>	<b>1.000.000</b>
<b>2021</b>	<b>330</b>	<b>1155</b>	<b>1.100.000</b>
<b>2022</b>	<b>336</b>	<b>1160</b>	<b>1.175.000</b>
<b>2023</b>	<b>336</b>	<b>1160</b>	<b>1.200.000</b>

*Sumber: BPS pedapatan perkapitaDesa Mekar Sari Ness tahun 2015-2023*

Dalam sembilan tahun terakhir, meskipun terdapat sedikit peningkatan dalam pendapatan per kapita di Desa Mekar Sari Ness setelah dilakukan pemekaran desa, angka tersebut masih tergolong rendah. Tabel 1.3 menyajikan data jumlah pendapatan per kapita di Desa Mekar Sari Ness selama periode tahun 2015 hingga 2023, setelah pemekaran desa dilakukan. Tabel ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kartu keluarga, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita per bulan setelah pemekaran desa. Pada tahun 2015, tercatat 286 kartu keluarga dengan jumlah penduduk 1.081 orang, dan pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp750.000. Pada tahun-tahun berikutnya, terlihat bahwa pendapatan per kapita terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kartu keluarga dan penduduk. Peningkatan pendapatan per kapita berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan angka mencapai Rp1.175.000 pada tahun 2022 dan Rp1.200.000 pada tahun 2023, sementara jumlah

kartu keluarga dan penduduk tetap stabil pada 336 kartu keluarga dan 1.160 penduduk. Dari data ini, terlihat bahwa setelah pemekaran desa, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pendapatan per kapita masyarakat Desa Mekar Sari Ness, menunjukkan adanya dampak positif dari pemekaran desa terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk Miskin Penerima BPNT Di Desa Mekar Sari Ness**  
**2010- 2014 Sebelum dilakukan Pemekaran Desa**

<b>Tahun</b>	<b>Penduduk Jiwa Penerima PKH dan Bantuan Tunai</b>
<b>2010</b>	<b>22</b>
<b>2011</b>	<b>26</b>
<b>2012</b>	<b>29</b>
<b>2013</b>	<b>31</b>
<b>2014</b>	<b>31</b>

*Sumber dari data PKH dan BPNT Desa Batin tahun 2010- 2014*

Dapat dilihat dari perbandingan data sebelum di lakukan pemekaran desa pada 5 tahun sebelum dilakukan pemekaran desa bahwa penerima PKH dan BPNT mengalami kestabilan di Dusun merbau A dan merbau B bahwa penerima dari tahun 2010-2014 hanya 22-31 kartu keluarga saja yang sekarang menjadi Desa Mekar Sari Ness.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk miskin Penerima BPNT**  
**Setelah pemekaran desa Di Desa Mekar Sari Ness 2015-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Penduduk Jiwa Penerima PKH dan Bantuan Tunai</b>
<b>2015</b>	<b>59</b>
<b>2016</b>	<b>64</b>
<b>2017</b>	<b>69</b>
<b>2018</b>	<b>71</b>
<b>2019</b>	<b>75</b>
<b>2020</b>	<b>89</b>
<b>2021</b>	<b>95</b>
<b>2022</b>	<b>100</b>
<b>2023</b>	<b>117</b>

*Sumber dari data PKH dan BPNT Desa Mekar Sari Ness tahun 2015-2023*

Desa Mekar Sari Ness, dalam rentang waktu 2015 hingga 2023, mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin yang menjadi penerima manfaat Program Bantuan Pemerintah. Dalam periode tersebut, jumlah penduduk miskin di desa tersebut meningkat dari 38 kartu keluarga menjadi 117 kartu keluarga dari 336 kartu keluarga dan 2818 jiwa penduduk. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan adanya permasalahan yang perlu ditangani secara serius, dan dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya pemekaran desa kemiskinan di Desa Mekar Sari Ness mengalami peningkatan.<sup>12</sup>

Analisis kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa di Desa Mekar Sari Ness menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta

---

<sup>12</sup> Sumber data tentang kenaikan jumlah penerima PKH dan BPNT di Desa Mekar Sari Ness pasca pemekaran Desa

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini juga akan mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Mekar Sari Ness setelah pemekaran desa, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan tantangan yang dihadapi oleh desa pasca pemekaran, dapat diambil langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebelum penelitian ini dilakukan, beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai tentang kesejahteraan masyarakat, berikut penelitian-penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan:

Penelitian pertama Dari hasil penelitian simpulan Ira Ramadhani alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi, yang berjudul “Presepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Publik Di Desa Teluk Kembang Jambu Pasca Pemekaran pada tahun 2012” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi publik yang ada di desa Teluk Kembang Jambu sudah diterapkan aspek Bukti Fisik (Tangible), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empathy) beserta indikatornya. Namun masih ditemui beberapa masalah, misalnya ruang tunggu pelayanan dimana 58% masyarakat menjawab tidak ada ruang tunggu pelayanan. Dan kemampuan petugas dalam menggunakan komputer, 60% masyarakat menyebut jika petugas masih sering menemui hambatan dalam mengoperasikannya. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa menanggapi hal tersebut yaitu dengan memperketat lagi peraturan mengenai waktu penyelesaian berkas administrasi milik masyarakat, jam kerja petugas dan penggunaan seragam dalam memberikan pelayanan. Serta untuk permasalahan ruang tunggu pelayanan dan juga kotak saran hingga saat ini belum ada

rencana untuk pembuatannya.<sup>13</sup>

Penelitian kedua Menurut kesimpulan Fernando Laik Sikal alumni Ilmu Pemerintahan Universtas Jambi dalam skripsi nya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Pada Desa Temalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun peningkatan kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap Pembangunan di desa Onemanu. Terlihat pendapatan meningkat setelah pemekaran dan tingkat pendidikan membaik setelah pemekaran karena membaiknya sarana dan prasarana.<sup>14</sup>

Penelitian ketiga Menurut kesimpulan Imam sapi’i, Anastasia murdyastuti, Hadi makmur dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember” dari hasil penelitiannya Dapat disimpulkan bahwa pemekaran desa berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur. Sementara dampak negatif yang terjadi adalah kesenjangan sosial di masyarakat. Kondisi ini dikarenakan sebab akibat secara beruntun. Dengan pembangunan jalan yang tidak merata mengakibatkan kemudahan komunikasi antar masyarakat juga tidak merata. Perbedaan aktifitas komunikasi tersebut mengakibatkan perolehan perekonomian yang juga tidak merata.<sup>15</sup>

Secara umum dari tiga penelitian sebelumnya tentang pengaruh pemekaran desa, ketiga peneliti berpendapat bahwa pemekaran desa berdampak pada

---

<sup>13</sup> Ira Ramadhani, ‘Presepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Publik Di Desa Teluk Kembang Jambu Pasca Pemekaran Pada Tahun 2012’, *Skripsi Ilmu Pemerintahan*, 2023, 1–26 <<https://repository.unja.ac.id/58292/>>.

<sup>14</sup> Fernando Laik Sikal, ‘Analisis Pelaksanaan Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Pada Desa Temalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun’, *Skripsi Ilmu Pemerintahan*, 5.1 (2023), 1–16 <[https://repository.unja.ac.id/2383/1/artikel\\_nando.pdf](https://repository.unja.ac.id/2383/1/artikel_nando.pdf)>.

<sup>15</sup> Imam Sapi’i, Anastasia Murdyastuti, and M. Hadi Makmur, ‘Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan , Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember’, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1.1 (2019), 1–7 <<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57671>>.

masyarakat, Perbedaan kajian tersebut akan mengarah pada pemeriksaan ulang pengaruh pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kesejahteraan pasca pemekaran desa.

Ada perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan serta penelitian peneliti lain, seperti yang ditunjukkan dalam skripsi di atas, berdasarkan penelusuran yang saya lakukan tentang tinjauan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut. Selain itu, perbedaan dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian saya berfokus pada Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemerintah setelah pemekaran desa berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008, yang didasari dengan pelayanan administrasi yang mendukung, infrastruktur yang cukup, peningkatan keadaan ekonomi masyarakat, sosial budaya, dan politik, serta pelaksanaan pemekaran desa dan otonomi daerah. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada masyarakat umum dan terutama bagi peneliti sendiri Melalui studi kasus di Desa Mekar Sari Ness, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat umum dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa.<sup>16</sup>

Melalui literatur yang peneliti lakukan, peneliti memahami bahwa pemekaran desa seringkali dikaitkan dengan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian terdahulu menyoroti pentingnya menganalisis indikator kesejahteraan setelah perubahan struktural semacam itu. Peneliti juga menemukan penelitian yang menggambarkan variasi dampak pemekaran desa terhadap masyarakat. Dari literatur tersebut peneliti memperoleh pemahaman awal bahwa

---

<sup>16</sup> Peraturan daerah no 6 tahun 2008 tentang syarat ketentuan pemekaran desa

analisis terperinci mengenai perubahan kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran desa sangat penting untuk memberikan gambaran yang akurat tentang dampak dari peristiwa tersebut.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dari latar belakang diatas, pada penelitian ini ingin mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan:

- 1.2.1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance oleh pemerintah desa dalam mengatasi masalah kemiskinan pasca pemekaran Desa Mekar Sari Ness?
- 1.2.2. Sejauh mana penerapan Good Governance berdampak terhadap efektivitas program-program pengentasan kemiskinan di Desa Mekar Sari Ness pasca pemekaran desa?

Dengan merumuskan masalah tersebut, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat, faktor-faktor yang berdampak terhadap, akses terhadap layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, serta potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Desa Mekar Sari Ness pasca pemekaran desa.

## **1.3.Tujuan penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa tujuan antara lain mempengaruhi sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Governance oleh pemerintah desa dalam mengatasi masalah kemiskinan pasca pemekaran Desa Mekar Sari Ness.
- 1.3.2. Untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan Good Governance berdampak terhadap efektivitas program-program pengentasan kemiskinan di Desa Mekar Sari Ness pasca pemekaran desa.

## **1.4. Manfaat penelitian**

Laporan penelitian ini akan diharapkan dapat berguna, Adapun kegunaan laporan ini yaitu:

### 1.4.1. Teoritis

Hasil penelitian yang secara teoritis ini sebagai masukan bagi pemerintah yaitu mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan pelayanan publik.

### 1.4.2. Praktis

#### 1. Peneliti

Sebagai bahan tambahan informasi bagi para peneliti, khususnya yang berkaitan dengan bidang studi yang ditempuh pada perkuliahan, maka penelitian ini akan berguna sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya.

#### 2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini akan dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya agar peneliti selanjutnya dapat menyempurnakannya.

#### 3. Bagi Desa Mekar Sari Ness Melalui hasil penelitian ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pengetahuan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

## 1.5.Landasan teori

### 1.5.1.Good Governance

Adalah konsep yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Tata kelola ini tidak hanya berfokus pada kinerja pemerintahan, tetapi juga pada cara pemerintahan tersebut dijalankan dan dampaknya terhadap masyarakat. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap berbagai masalah dalam praktik pemerintahan, seperti korupsi, inefisiensi, dan ketidakadilan, yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Teori Good Governance dipopulerkan oleh lembaga internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP) dan Bank Dunia. Good Governance merujuk pada cara bagaimana kekuasaan publik digunakan untuk mengelola sumber daya sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau wilayah dengan cara yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini melibatkan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan adil, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran.<sup>17</sup>

Prinsip-Prinsip Good Governance Teori Good Governance sering didasarkan pada sejumlah prinsip kunci yang dianggap esensial untuk tata kelola pemerintahan yang baik:

- a. **Transparansi:** Akses terbuka terhadap informasi tentang keputusan dan tindakan pemerintah. Transparansi mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas
- b. **Partisipasi:** Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan

---

<sup>17</sup> United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (UNDP, 1997),

keputusan. Partisipasi yang luas dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan mencerminkan kepentingan semua kelompok masyarakat.

- c. Akuntabilitas:Pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus dapat diawasi oleh masyarakat serta lembaga pengawas.
- d. Efektivitas dan Efisiensi:Kebijakan dan tindakan pemerintah harus mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
- e. Responsivitas:Pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat, serta mampu memberikan layanan yang cepat dan tepat.
- f. Kesenjangan dan Keadilan: Semua warga negara harus memiliki akses yang setara terhadap manfaat pembangunan dan kebijakan publik, tanpa diskriminasi.

Pentingnya Good Governance Good Governance dianggap sebagai elemen kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang baik mampu menciptakan lingkungan yang stabil, di mana masyarakat dapat berkembang dengan akses yang adil terhadap sumber daya, kesempatan, dan perlindungan hukum.<sup>18</sup>

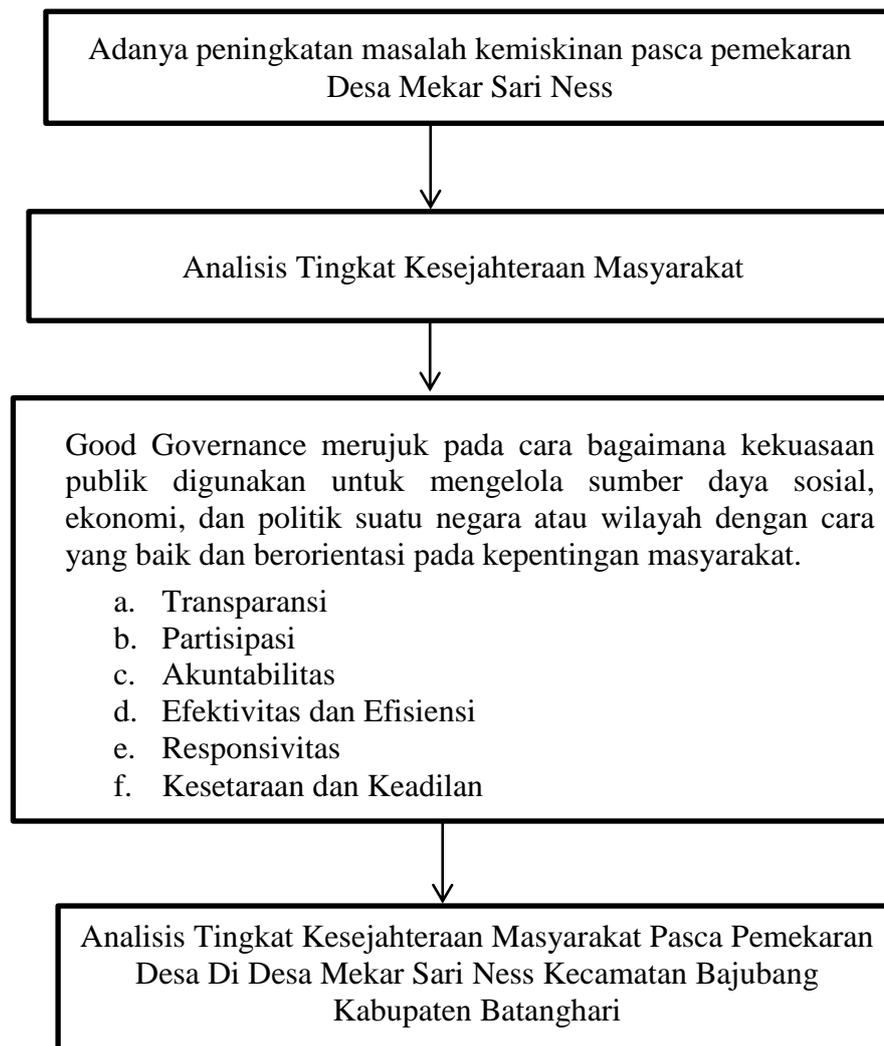
Penerapan Good Governance Dalam konteks pemerintahan desa atau lokal, penerapan prinsip-prinsip Good Governance dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya yang lebih baik, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan publik, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini penting terutama dalam konteks pasca pemekaran desa, di mana tata kelola yang baik dapat menjadi fondasi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> World Bank, *Governance and Development* (Washington, D.C.: The World Bank, 1992)

<sup>19</sup> Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobaton, P., *Governance Matters* (The World Bank, 1999),

### 1.6.Kerangka Berfikir



Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur berpikir dalam menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran desa di Desa Mekar Sari Ness, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Penelitian ini berfokus pada dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa. Dalam menganalisis hal ini, penelitian menggunakan teori Good Governance sebagai landasan teoritis, Good Governance menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan hubungan antara pemekaran desa, program kebijakan pemerintah, dan kesejahteraan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dari pemekaran desa dalam mencapai kesejahteraan yang diinginkan.

## 1.7. METODE PENELITIAN

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif ini adalah jenis penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara detail semua data dan juga keadaan yang berkaitan dengan subjek maupun objek penelitian. Kemudian, data tersebut akan dianalisis dan dibandingkan dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Penelitian ini juga berusaha untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dan memberikan informasi terkini yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk diterapkan pada masalah yang relevan.<sup>20</sup>

Adapun pertimbangan dalam menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan metode kualitatif mampu dan mudah untuk menyesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan ganda. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti ingin mencoba untuk memahami makna dari suatu kejadian melalui interaksi yang dilakukan bersama dengan orang dalam situasi atau fenomena tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>21</sup> Musri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2014)

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas dan lengkap,serta mempermudah peneliti untuk melakukan observasi.Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten Batanghari di kecamatan Bajubang Desa Mekar Sari Ness penelitian ini dilakukan dari bulan agustus 2023 sampai dengan selesai.

### **1.7.3. Sumber Data**

Secara umum dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti melalui informasi secara langsung terhadap objek penelitian. Data yang diperoleh akan menghasilkan catatan tertulis atau catatan lapangan terkait apa saja yang telah didengar, dilihat, dialami, juga dipikirkan dalam memperoleh data sehingga hasil dari catatan tersebut akan digunakan sebagai penunjang yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang merujuk pada informasi yang diperoleh berdasarkan referensi untuk mendukung data primer. Jenis data ini mencakup buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, maupun media digital (berita).

### **1.7.4. Fokus Penelitian**

Penelitian ini lebih memfokuskan pada Analisis kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa dan upaya yang dilakukan pemerintah desa Mekar Sari

Ness dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui analisis kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa melalui analisis tingkat masyarakat miskin dan tingkat menengah yang ada di desa Mekar Sari Ness.

#### **1.7.5. Teknik penentuan informan**

Dalam penentuan informan, tentunya didasarkan pada keterlibatan mereka dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Informan penelitian merupakan orang yang memiliki pemahaman mendalam terhadap konteks yang menjadikan mereka memiliki pengetahuan yang relevan serta secara rutin memberikan informasi mengenai situasi yang sedang terjadi terhadap pertanyaan peneliti.

Dalam penelitian ini, *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam menentukan informan dengan melibatkan pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan juga tujuan tertentu untuk memperoleh data yang relevan. Adapun daftar informan dalam penelitian ini:

1. Kepala desa Mekar Sari Ness
2. Kasipem Mekar Sari Ness
3. Tokoh masyarakat
4. masyarakat yang ada di desa Mekar Sari Ness

#### **1.7.6. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.

##### **1. Wawancara**

Suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan orang yang diwawancarai. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, dan gerak tubuh serta ekspresi narasumber merupakan modus media bahwa kata-kata melengkapi kata-kata. Dengan demikian, wawancara tidak hanya menangkap

pemahaman dan ide, tetapi juga perasaan, pengalaman, emosi, dan motivasi dari orang yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Identifikasi informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposeful sampling dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian.

## 2. Observasi

Pengamatan atau observasi dalam penelitian ini merupakan cara untuk mendapatkan data primer pada saat menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran desa. Berdasarkan obyek penelitian, penulis memilih observasi non partisipan yaitu peneliti hanya mengamati proses perluasan. Mekar Sari Ness, kebijakan pemerintah dan tulisan yang sejalan dengan penelitian ini

Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian ini adalah beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh desa Mekar Sari ness, kebijakan pemerintah dan tulisan yang sejalan dengan penelitian ini.

### 1.7.7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, terdapat empat hal yang harus dikerjakan yaitu:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh pada saat melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan juga reflektif.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu langkah awal yang dilakukan dalam pencarian tema dan pola yang relevan untuk fokus penelitian. Pencatatan, merangkum, juga pemilihan informasi yang krusial merupakan prioritas dalam proses reduksi ini yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih terarah dan

jasas terkait isu yang sedang diteliti. Melalui cara ini, peneliti akan semakin mudah untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang perlu dipelajari dalam dampak pemekaran desa bagi kesejahteraan Masyarakat dalam menangani masalah kemiskinan. Data yang telah direduksi akan menjadi landasan yang kuat untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi tambahan yang lebih relevan dan mendukung pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesejahteraan Masyarakat pasca pemekaran desa.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data memiliki ragam bentuk untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik serta perencanaan mengenai langkah selanjutnya. Penyajian data dalam berbagai bentuk ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang komperensif serta memudahkan peneliti dalam memahami dinamika kemiskinan. Melalui pemahaman yang lebih baik, selanjutnya dalam Analisis tingkat kesejahteraan Masyarakat pasca pemekaran desa di Desa Mekar Sari Ness dapat disusun secara lebih terarah dan lebih efektif.<sup>22</sup>

### 4. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam proses penelitian. Kesimpulan yang diambil merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan pada tahap awal penelitian. Namun, kesimpulan ini tetap terbuka untuk perkembangan yang lebih lanjut karena penelitian belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek yang terdapat dilapangan.

Dalam konteks Analisis tingkat kesejahteraan Masyarakat pasca pemekaran desa di Desa Mekar Sari Ness, kesimpulan awal dapat

---

<sup>22</sup> *Ibid Hlm 113*

menggambarkan sejauh mana tingkat kesejahteraan Masyarakat pasca pemekaran desa, apakah sudah memberikan dampak yang baik atau masih membutuhkan perbaikan. Kesimpulan ini juga dapat menyoroti keberhasilan, hambatan, potensi, serta solusi yang muncul selama melakukan penelitian.

#### **1.7.8. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan cerminan validitas dari hasil data dan informasi yang didapatkan. Keabsahan data menunjukkan bahwa semua data dan informasi yang diperoleh melalui proses pengamatan dan ketelitian untuk memastikan keakuratan dari informasi yang diberikan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa data yang didapatkan dapat dipercaya. Untuk itu, dalam validitas data maka terdapat beberapa mekanisme yang bisa digunakan seperti triangulasi yang termasuk triangulasi sumber, triangulasi metode, serta triangulasi teori.

Dari beberapa jenis triangulasi yang telah disebutkan diatas, untuk menilai keabsahan data, maka peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan atau memeriksa ulang keandalan informasi yang dikumpulkan sepanjang waktu dan menggunakan teknik dalam pendekatan kualitatif. Hal ini dapat dicapai melalui perbandingan data observasi dengan data wawancara, yang dilanjutkan dengan perbandingan pernyataan publik yang dibuat sepanjang waktu dengan pernyataan yang mengenai keadaan penelitian. Kemudian, bandingkan keadaan dengan sudut pandang orang yang diwawancarai dengan orang lain, dan membandingkan hasilnya dengan isi dokumen yang dianggap relevan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid Hlm 130*